

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Institut Pertanian Bogor wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi IPB.

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja IPB, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya. Pengukuran kinerja IPB tahun 2019 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja IPB Tahun 2019

Capaian kinerja IPB berdasarkan dokumen Kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Rektor IPB dan disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta, diukur berdasarkan capaian kinerja pada tujuh sasaran dan 18 indikator kinerja. Ketujuh sasaran tersebut, yaitu: (1) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara, (2) Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik, (3) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, (4) Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya, (5) Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, (6) Meningkatnya kualitas kelembagaan, dan (7) Menguatnya kapasitas inovasi. Capaian kinerja IPB tahun 2019 berdasarkan kontrak kinerja disajikan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja IPB Berdasarkan Kontrak Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100
2.	Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	WTP	WTP	100
3.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa berwirausaha	450	485	107,78
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	85	90,50	106,47
		Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A)	80	79,41	99,26
		Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	65	69,26	106,55
4.	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	70	67,65	96,64
		Persentase dosen dengan jabatan guru besar	18	16,82	93,44
5.	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	Jumlah publikasi internasional	1.000	1.066	106,60
		Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan	60	105	175,0
		Jumlah Prototipe Industri	33	34	103,03

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	50	35	70,00
		Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	2	3	150,00
		Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	55.000	62.642	113,89
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan	Peringkat di QS University Ranking	<500	601-650	80,00
		Tingkat Maturitas Kawasan Sains dan Teknologi	Tingkat Madya	Tingkat Madya	100
		Jumlah Pusat Unggulan Iptek	7	6	85,71
7.	Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah Produk Inovasi	9	9	100

Berdasarkan Tabel 3.1, dari 18 indikator kinerja sebanyak 12 indikator atau 67 persennya telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya jauh melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja berkisar antara 100% sampai dengan 175%. Sebanyak 6 (enam) atau 33,33% indikator masih belum mencapai target yang direncanakan, dengan capaian kinerja antara 70% sampai dengan 99,26%. Uraian berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja IPB tahun 2019 berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam tujuh sasaran.

3.1.1. Sasaran Kinerja: Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran kinerja Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Negara diukur dari indikator kinerja jumlah Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti Nomor: T1296/G3/PA.01.00/2019 tertanggal 5 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan IPB Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di IPB berada pada level **Terdefinisi** atau **tingkat 3**. Pengukuran tingkat maturitas dilakukan terhadap 25 fokus penilaian maturitas, nilai maturitas SPIP yang diperoleh IPB adalah sebesar **3,939** dengan nilai masing-masing unsur SPIP seperti disajikan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2. Perolehan Nilai Masing-masing Unsur SPIP di Lingkungan IPB

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
A	Lingkungan Pengendalian	30	3,750	1,125
B	Penilaian Resiko	20	3,000	0,600
C	Kegiatan Pengendalian	25	4,455	1,114
D	Informasi dan Komunikasi	10	5,000	0,500
E	Pemantauan	15	4,000	0,600
	Tingakt Maturitas	100		

Tingkat maturitas dengan level **Terdefinisi**, berarti penyelenggaraan SPIP di lingkungan IPB secara umum menunjukkan bahwa:

- 1) Telah melaksanakan pendokumentasian secara konsisten mengenai Peraturan Senat Akademik IPB;
- 2) Telah membuat Buku Pegangan Implementasi Manajemen Resiko di IPB;
- 3) Telah melaksanakan Kontrak Kinerja Rektor dan Menristekdikti tahun 2019;
- 4) Telah sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi.

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat **Terkelola dan Terukur**, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti memberikan beberapa saran kepada IPB untuk melakukan perbaikan, yaitu:

- 1) Membuat kebijakan/prosedur tentang standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan karena belum dikembangkan dan dilakukan evaluasi secara berkala.
- 2) Memfasilitasi aplikasi SIMPEG yang dapat digunakan sebagai mekanisme perencanaan/pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penempatan/penetapan formasi jabatan untuk seluruh posisi jabatan.
- 3) Melakukan evaluasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia secara berkala, agar pelaksanaan evaluasi pedoman tidak terlalu lama yaitu tahun 2015 dan baru diperbaiki pada tahun 2018.
- 4) Menerapkan kebijakan pembinaan sumber daya manusia secara otomatis (aplikasi komputer/web) yang berdasarkan database kepegawaian untuk memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas kewajibannya yang telah ditetapkan sehingga yang berakibat pada *punishment*, dan ketaatan pegawai.

- 5) Agar membuat program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksinya.
- 6) SPI belum memberikan peringatan dini bagi pimpinan organisasi dan belum dapat meningkatkan efektivitas manajerial resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya unit organisasi/unit kerja, hal tersebut berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK RI.
- 7) Masih terdapat hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2015 dan 2018 untuk pemantauan tindak lanjutnya yang belum selesai.

3.1.2. Sasaran Kinerja: Terwujudnya Tata Kelola serta Kualitas Layanan Yang Baik

Sasaran kinerja Terwujudnya Tata Kelola Serta Kualitas Layanan Yang Baik diukur dari indikator kinerja Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik. Laporan Keuangan IPB yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan dan hasilnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai dengan yang telah ditargetkan. Capaian ini merupakan cerminan bahwa tata kelola keuangan di IPB telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Opini WTP atas laporan keuangan adalah opini tertinggi yang dicapai setelah audit terhadap laporan keuangan. IPB mendapat opini WTP dari KAP sejak tahun 2008, sehingga sampai dengan laporan keuangan tahun 2018 IPB telah 11 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP atas laporannya. Capaian ini ke depan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga jumlah catatan rekomendasi dari KAP menjadi semakin sedikit.

3.1.3. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan dicirikan oleh empat indikator kinerja sebagai berikut: (1) Jumlah mahasiswa berwirausaha, (2) Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, (3) Persentase prodi terakreditasi Unggul (A), dan (4) Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja.

Aktivitas dan jiwa kewirausahaan bagi lulusan perguruan tinggi perlu terus ditumbuhkembangkan agar mampu menjadi *entrepreneur* yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan baru, dimana IPB telah mengembangkan beberapa kebijakan dan program terkait kewirausahaan, seperti program Pembinaan *Young Agripreneur* dan Magang Profesional (*co-op student placement*). Program ini dirancang untuk menyiapkan para alumni untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan diharapkan menjadi *entrepreneur* yang tangguh, dengan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan magang/pelatihan melalui "co-operative education atau internship" di perusahaan-perusahaan mitra IPB yang

bergerak di bidang pertanian, peternakan, kehutanan perikanan dan perkebunan, dengan mengutamakan perusahaan yang dimiliki/dipimpin oleh lulusan IPB.

Program lainnya adalah Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan, dan pendampingan usaha. Melalui PMW diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan aktivitas berwirausaha serta mempercepat pertumbuhan wirausaha-wirausaha baru dengan basis IPTEKS. Melalui program-program yang telah dilaksanakan, jumlah mahasiswa IPB yang berwirausaha pada tahun 2019 tercatat 485 orang, melampaui target yang ditetapkan sebesar 450 orang. Ke depan jumlah mahasiswa yang berwirausaha diharapkan dapat meningkat lagi.

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi merupakan indikator untuk mengukur kualitas lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional.

Pada tahun 2019, persentase lulusan IPB bersertifikat kompetensi dan profesi adalah sebesar 90,5 persen, melampaui target yang ditetapkan yaitu 85 persen. Capaian ini diperoleh dari hasil perhitungan dari persentase jumlah lulusan terhadap jumlah peserta Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH). Pada tahun 2019, IPB meluluskan 181 dokter hewan dari total peserta PPDH sebanyak 200 orang.

Persentase program studi (prodi) terakreditasi unggul (A) merupakan indikator untuk mengukur kinerja prodi yang telah terakreditasi A sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2019 dari total 170 program studi (prodi) multistrata yang ada di IPB, tercatat 135 prodi atau 79,41 persen diantaranya telah terakreditasi Unggul (A) dari BAN-PT. Angka capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 80 persen. Oleh karena itu, IPB harus terus berupaya agar dapat meningkatkan capaian kinerja dari indikator ini, salah satunya adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan fasilitasi akreditasi prodi untuk mendorong peningkatan prodi di IPB yang mendapatkan akreditasi Unggul dari BAN-PT.

Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang 6 (enam) bulan berdasarkan Laporan Tracer Study (TS) Perguruan Tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan Tracer Study (periode TS-2). Berdasarkan laporan TS 2019 tercatat persentase lulusan yang langsung berkerja mencapai

angka 69,26 persen, melebihi target yang ditetapkan yaitu 65 persen. Perolehan capaian ini merupakan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, seperti magang profesi, pelatihan karir memasuki dunia kerja, program wirausaha mahasiswa, dan kegiatan *In Campus Recruitment*.

3.1.4. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya

Sasaran kinerja Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya dicirikan oleh dua indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase dosen berkualifikasi S3, dan (2) Persentase dosen dengan jabatan guru besar.

Persentase dosen tetap yang memiliki kualifikasi doktor (S3) pada akhir tahun berjalan terhadap total dosen tetap merupakan tolok ukur (*benchmarking*) terhadap kemampuan perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implementasi tridharma perguruan tinggi. Sampai dengan kondisi 31 Desember 2019, dosen IPB berjumlah 1.326 orang dan yang berkualifikasi S3 berjumlah 897 orang, sehingga persentase dosen IPB dengan kualifikasi S3 adalah 67,65 persen. Perolehan angka ini masih belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 70 persen. Angka perolehan ini juga lebih kecil dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 71,3 persen. Penyebab tidak tercapai target kinerja dari indikator ini adalah karena adanya rekrutmen dosen tetap Non PNS sebanyak 102 orang, dimana sebagian besar berkualifikasi S2, sedangkan penambahan dosen yang berkualifikasi S3, pada tahun 2019 berjumlah 23 orang.

Jumlah dosen IPB dengan jabatan guru besar sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat sebanyak 223 orang dari total dosen yang berjumlah 1.326 orang. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase dosen tetap yang memiliki jabatan akademik guru besar pada tahun 2019 adalah sebesar 16,82 persen. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 18 persen. Salah satu penyebab tidak tercapainya target kinerja untuk indikator kinerja ini karena pada tahun 2019 terdapat sejumlah guru besar yang pensiun yaitu sebanyak 10 orang, sementara penambahan guru besar berjumlah 12 orang, sehingga penambahan jumlah guru besar pada tahun 2019 terlihat kecil, hanya bertambah 2 (dua) orang. Ke depan IPB perlu terus berupaya untuk mengembangkan strategi yang sesuai serta memperkuat program percepatan kenaikan jabatan dosen dari Lektor Kepala ke Guru Besar.

3.1.5. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan

Sasaran kinerja Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan dicirikan oleh enam indikator kinerja sebagai berikut: (1) Jumlah publikasi internasional, (2) Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan, (3) Jumlah prototipe industri, (4) Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional, (5) Jumlah jurnal bereputasi terindeks global, dan (6) Jumlah sitasi karya ilmiah.

Capaian indikator kinerja jumlah publikasi internasional terindeks Scopus pada tahun 2019 adalah 1.066 publikasi dengan komposisi 629 berupa artikel yang diterbitkan di jurnal internasional (59 persen), dan sisanya merupakan prosiding seminar, sebanyak 437 artikel (41 persen). Capaian kinerja indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 1.000 artikel. Capaian ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan dalam mendorong peningkatan mutu dan jumlah publikasi internasional. Upaya-upaya tersebut diantaranya, penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi penulisan artikel ilmiah untuk dosen dan mahasiswa program pascasarjana, pemberian insentif kepada penulis yang dapat mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional bereputasi yaitu terindeks Scopus, serta penyelenggaraan seminar/konferensi internasional di IPB.

Publikasi ilmiah merupakan indikator sangat penting dari kinerja penelitian. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu dan jumlah publikasi ilmiah, terutama di jurnal internasional telah didorong terus-menerus. Untuk meningkatkan kemampuan para dosen dan mahasiswa program pascasarjana dalam mempublikasikan karyanya di jurnal internasional bereputasi maka telah diselenggarakan pelatihan dan fasilitasi penulisan artikel ilmiah. IPB memberikan insentif kepada penulis yang dapat mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional bereputasi yaitu terindeks Scopus atau memiliki *impact factor*.

Pada tahun 2019 IPB mendaftarkan kekayaan intelektual (paten dan HKI lainnya) sebanyak 105 kekayaan intelektual. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, yaitu 55 kekayaan intelektual. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan tersebut terdiri atas 61 judul paten, 43 judul hak cipta, dan satu judul merek. Jumlah paten dan HKI yang didaftarkan merupakan salah satu indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi menuju *World Class University* (WCU) serta menjadi cermin pemanfaatan potensial IPTEKS oleh masyarakat. Pendaftaran HKI dilakukan dengan menggunakan dua skema pendanaan, yaitu Kemenristekdikti dan IPB.

Capaian kinerja IPB untuk indikator jumlah prototipe industri pada tahun 2019 adalah 34 prototipe, melebihi target yang ditetapkan yaitu 33 prototipe. Prototipe industri tersebut terdiri atas 19 *tenant inwall*, dan 15 *tenant outwall*.

Capaian indikator kinerja jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional (SINTA) pada tahun 2019 adalah 35 jurnal, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50 jurnal. Berbagai kendala masih dijumpai untuk meningkatkan jumlah jurnal bereputasi nasional terindeks SINTA diantaranya kemampuan pengelola jurnal, meningkatnya jumlah jurnal sejenis di tingkat nasional, fokus peneliti untuk lebih memilih jurnal internasional bereputasi serta belum adanya kewajiban penerbitan jurnal dari hasil skripsi S1. Upaya penguatan pengelolaan jurnal telah dilakukan melalui konsolidasi serta *sharing* antar pengelola jurnal, fasilitasi pendaftaran *Digital Object Identifier* (Crossref) dan pengelolaan *Open Journal System* (OJS). Upaya lain yang perlu dilakukan adalah pendampingan indeksasi jurnal serta insentif pengelolaan jurnal. Kedua program

ini perlu mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2020 agar percepatan indeksasi nasional dapat dilakukan.

Jumlah jurnal bereputasi terindeks global pada tahun 2019, capaiannya adalah 3 (tiga) jurnal, melebihi target yang ditetapkan, yaitu 2 (dua) jurnal. Secara keseluruhan sampai akhir tahun 2019, terdapat tiga jurnal yang terindeks Scopus dan 4 (empat) jurnal terindeks ESCI.

Capaian kinerja indikator jumlah sitasi karya ilmiah pada tahun 2019 tercatat sebesar 62.642 sitasi. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 55.000 sitasi. Angka ini pun merupakan dampak dari adanya peningkatan jumlah publikasi internasional pada tahun 2019.

3.1.6. Sasaran Kinerja: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas kelembagaan dicirikan oleh tiga indikator kinerja sebagai berikut: (1) Peringkat di *QS University Ranking*, (2) Tingkat maturitas Kawasan Sains dan Teknologi, dan (3) Jumlah pusat unggulan IPTEK.

Rangking IPB pada tahun 2019 menurut *QS University Ranking* yaitu berada di posisi 601-650, atau tepatnya pada rangking 634. Capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu <500. Walaupun belum mencapai target, rangking IPB berdasarkan data, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan rangking IPB menurut data QS WUR selama tiga tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2019 berturut-turut adalah 766, 728, dan 634. Terkait perangkungan yang lainnya, pada tahun 2019 IPB tetap masuk dalam Top 100 QS WUR by Subject Agriculture & Forestry Rank 74 dan Rank 132 QS AUR.

Sampai saat ini, IPB terus berupaya memperkuat posisi dalam lingkup penyelenggaraan Pendidikan tinggi kelas dunia, dengan cara berupaya aktif dalam forum-forum internasional. Hasil dari upaya yang telah dilakukan menyebabkan reputasi IPB pada tahun 2019 meningkat dan memperoleh pengakuan internasional, antara lain ditunjukkan oleh: (1) berada pada posisi Top 100 (rangking 74; meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang berada pada rangking 79) *QS World University Ranking by Subject in Agriculture and Forestry 2019*, dan peringkat 132 pada *QS Asian University Rangking 2019* (turun dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu peringkat 130), dan (2) memiliki jejaring akademik untuk program *double degree* (Australia, Jerman, Jepang, Perancis, Taiwan), *joint degree* (Belanda, Jepang), dan *staff & student exchange* (Erasmus+, AIMS, PARE, EU-SHARE, SUIJI, dan lain sebagainya) dan (3) menyelenggarakan seminar dan *summer course international* yang rutin dan berkelanjutan terkait isu-isu SDGs.

Kawasan Sains dan Teknologi adalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam satu

kawasan baik terintergrasi maupun terkoneksi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.

Kawasan Sains dan Teknologi yang matang (*mature*) digunakan untuk mengukur kinerja *Park Science Techno* (STP) yang berkelanjutan dikaitkan dengan aspek kelembagaan, pengelolaan, program, jejaring, dan pengembangan untuk meningkatkan layanan teknologi kepada industri dan riset berkelanjutan, pertumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi melalui inkubasi dan proses *spin-off* yang merupakan kolaborasi antara akademisi, dunia usaha dan pemerintah.

Kematangan Kawasan Sains dan Teknologi diukur dengan komponen penilaian yang dirinci berdasarkan rangkaian: Input, Proses, Output, Outcome dan Impact sesuai dengan Pedoman Peningkatan Maturitas Kawasan Sains Teknologi di Indonesia. Tingkat kematangan ekosistem kawasan Sains Teknologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkatan. Tiga tingkatan kematangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pratama: Menggambarkan tahap pengembangan Kawasan Sains Teknologi dalam kondisi inisiasi dan tahap pengembangan awal. Layanan KST sudah beroperasi namun belum lengkap;
- 2) Madya: Menggambarkan tahap pengembangan Kawasan Sains Teknologi dalam keadaan sedang bertumbuh dan berkembang (*growth*), Layanan KST sudah berjalan baik dan lengkap, namun luaran dan dampak belum maksimal; dan
- 3) Utama: Menggambarkan tahap pengembangan Kawasan Sains Teknologi dengan ekosistem yang lengkap dan matang dalam menunjang layanan/ peran utama KST. Dan dalam mendukung kegiatan transfer teknologi dan inovasi. Semua layanan KST berjalan sangat baik dan telah memiliki dampak yang terukur baik.

Capaian kinerja IPB pada tahun 2019 untuk indikator kinerja tingkat maturitas Kawasan Sains dan Teknologi adalah tingkat **Madya**, sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke depan tentunya IPB harus terus berupaya untuk meningkatkan kinerja ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat Utama.

Capaian indikator kinerja jumlah pusat unggulan IPTEK (PUI) pada tahun 2019 adalah 6 (enam), masih sama dengan kondisi tahun 2017 dan 2018, tidak mencapai target yang ditetapkan yakni 7 (tujuh) pusat unggulan. Tidak tercapainya target ini lebih disebabkan karena IPB dianggap telah mempunyai banyak pusat unggulan dan dinilai sudah sewajarnya untuk memperkuat STP yang telah ada sebagai muara berbagai invensi yang dihasilkan PUI serta meningkatkan PUI yang ada menjadi PUI bertaraf internasional melalui strategi lompatan. Pengusulan PUI baru dapat melalui inisiatif IPB sendiri agar PUI potensial yang ada ataupun Pusat Penelitian lainnya (misalnya PPLH, CCROM dan INTERCAFE) dapat diakui secara internasional melalui sistem perangkingan lembaga riset internasional.

3.1.7. Sasaran Kinerja: Menguatnya Kapasitas Inovasi

Sasaran kinerja Menguatnya Kapasitas Inovasi dicirikan oleh satu indikator kinerja, yaitu jumlah produk inovasi. Target kinerja untuk indikator ini adalah 9 (sembilan) produk inovasi, dan capaiannya telah sesuai target yang ditetapkan. Sampai dengan akhir tahun 2019, kesembilan produk inovasi tersebut telah dinisiasi dan dalam proses negosiasi. Produk-produk inovasi tersebut, yaitu:

- 1) Kumis kucing
- 2) Pelangsing kunci pepet dan asam gelugur
- 3) Bahan kecantikan dari buah nyirih
- 4) Tepung komposit ayam crispy
- 5) Tepung komposit tempe
- 6) Rumpon portable
- 7) Nanospray
- 8) Cookies galohgor
- 9) Helm Green Composite

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pembahasan realisasi anggaran dalam laporan ini difokuskan pada pelaksanaan penggunaan dana BPPTNBbh yang bersumber dari Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti. Secara umum penggunaan dana BPPTNBbh IPB tahun 2019 telah dilaporkan secara periodik, yaitu setiap triwulan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) Kemenristekdikti. Selama tahun 2019, IPB selalu menyampaikan laporan triwulanan melalui SIMONEV secara tepat waktu. Realisasi anggaran IPB secara keseluruhan dibahas dalam dokumen Laporan Keuangan IPB Tahun 2019.

Pada tahun 2019, alokasi Bantuan Pendanaan PTNBH untuk IPB ditetapkan sebesar Rp 163.070.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah), termasuk sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2018 sebesar Rp 5.446.982 (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Penetapan anggaran ini atau yang biasa disebut anggaran Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN) Badan Hukum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Aturan lebih teknis dari PP No. 26/2015 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Realisasi penggunaan atau serapan anggaran BPPTNBbh IPB tahun 2019 sesuai dengan data yang telah dilaporkan melalui SIMONEV adalah sebesar Rp 163.068.644.799 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau hampir 100 persen, dengan menyisakan anggaran sebesar Rp

1.355.201 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Satu Rupiah). Sisa anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sisa anggaran yang tidak terserap ini tidak disetorkan kepada negara, artinya masih tetap disimpan di IPB dan akan menjadi pengurang untuk anggaran BPPTNbh IPB pada tahun anggaran berikutnya, TA 2020.

Anggaran BPPTNbh IPB tahun 2019 sebesar Rp 163.070.000.000 sering disebut sebagai anggaran BPPTNBbh operasional. Anggaran BPPTNbh opsional dialokasikan dari DIPA Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenristekdikti untuk menjalankan amanat PP No. 26/2015. Selain BPPTNbh operasional, pada tahun 2019 IPB juga menerima anggaran BPPTNbh selain dari Setjen berupa penugasan khusus untuk pelaksanaan program pengembangan yang anggarannya bersumber dari unit kerja eselon I Kemenristekdikti lainnya, yaitu: (1) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, (3) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, (4) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan (5) Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi. Total penerimaan anggaran BPPTNbh penugasan khusus adalah sebesar Rp 71.143.290.000 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), sehingga penerimaan keseluruhan BPPTNbh IPB (operasional dan penugasan khusus) tahun 2019 adalah Rp 234.213.290.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Penggunaan anggaran BPPTNbh penugasan khusus tidak termasuk yang dilaporkan dalam SIMONEV, karena Kemenristekdikti hanya mewajibkan IPB untuk melaporkan penggunaan dana BPPTNbh yang berasal dari Sekretariat Jenderal saja yang dilaporkan ke dalam SIMONEV. Realisasi penyerapan anggaran BPPTNbh penugasan khusus dianggap terserap semuanya, dan jika ada anggaran yang tidak terserap maka dikembalikan kepada negara. Sumber anggaran IPB selain BPPTNbh juga berasal dari anggaran reguler yang dialokasikan melalui DIPA IPB, yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS IPB. Pada tahun 2018, DIPA IPB adalah sebesar Rp 276.134.494.000 (Nomor: SP DIPA-042.01.1.400858/2018 tanggal 26 Oktober 2018). Selain itu anggaran IPB juga diperoleh dari penerimaan dana masyarakat (DM) yang meliputi sumbangan dana pendidikan (SPP), Non SPP, satuan usaha, dana kerjasama, dan hasil penerimaan pengelolaan kekayaan IPB PTN-BH. Realisasi penerimaan dan penggunaan DM (Non APBN) telah dilaporkan melalui SIMONEV Kemenristekdikti.

Semua penerimaan dana IPB pada tahun 2019 telah diupayakan penggunaannya secara optimal untuk mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan/diperjanjikan. Pengelolaannya pun telah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hasil pengelolaan yang telah

dilakukan tercermin dari pencapaian tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai institusi pemerintah, IPB di dalam pengelolaan keuangannya berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019, Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan telah melakukan penilaian atas Laporan Keuangan IPB yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil penilaian ini berarti Laporan Keuangan IPB Tahun 2018 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material; posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan penjelasan laporan keuangan tersajikan secara memadai, informatif serta tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Opini WTP dari KAP telah diperoleh IPB sejak tahun 2008, sehingga sampai dengan laporan keuangan tahun 2018 IPB telah 11 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP atas laporannya. IPB berharap dapat mempertahankan prestasi ini, sehingga laporan keuangan IPB tahun 2019 yang akan dinilai oleh KAP pada tahun 2020 pun mendapatkan opini WTP.